

Menumbuhkan Budaya Akuntabilitas Masyarakat
melalui Pemanfaatan Ruang-Ruang Partisipasi Masyarakat
dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Menumbuhkan Budaya Akuntabilitas Masyarakat
melalui Pemanfaatan Ruang-Ruang Partisipasi Masyarakat
dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



CERITA SUKSES

Semangat Juang Pertuni Malang Menggerus Budaya Diam

Penyandang difabel
mengeluarkan minimnya informasi
Menurut Ketua Persatuan
Tunanetra Indonesia (Pertuni)
Kota Malang, Supriyadi
Inisiatif sosialisasi justru datang
dari Malang Corruption
Watch (MCW).



<http://surabaya.tribunnews.com/>

Pertemuan demi pertemuan bulanan rutin digelar. Seiring dengan kegiatan itu, kapasitas Komunitas Pertuni (Persatuan Tuna Netra) Malang kian menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari sebanyak 50 orang, kebanyakan anggota sudah mengetahui substansi Undang-undang Pelayanan Publik. Mereka juga telah memahami apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, khususnya dalam hal pelayanan publik.

Dengan pemahaman yang mendalam terkait Undang-undang Pelayanan Publik, kesadaran anggota Pertuni pun mulai terbangun. Budaya diam dan nrimo mulai tergerus. Setidaknya para anggota sudah tidak lagi segan membahas kegagalan-kegagalan yang mereka alami, terkhusus dalam hal pendidikan, kesehatan, dan adminduk. Konsistensi pertemuan dan pendekatan diskusi yang menyentuh kondisi riil mereka, nyatanya lebih meningkatkan semangat advokatif anggota komunitas.

Hal-hal di atas tampak dari beberapa pengalaman di lapangan dalam periode April – Juni 2013 ini. Salah satu anggota komunitas Pertuni telah berani mengadukan upaya penahanan ijazah oleh salah satu oknum SMKN di Kota Malang. Bersama rekan-rekan sekomunitasnya, ia mengadvokasi kasus ini. Keterbatasan fisik tidak mengecilkan semangat mereka. Memang masih dalam dampingan Malang Corruption Watch (MCW). Namun, seluruh kegiatan advokasi, dapat dikatakan, dilakukan oleh anggota komunitas Pertuni sendiri.

Berikutnya adalah seperti yang dikisahkan salah satu anggota komunitas yang telah berani menegur petugas kelurahan. Menurutnya, si petugas telah bersikap angkuh dan cuek terhadapnya karena alasan keterbatasan fisik. Ia menegurnya dengan maksud si petugas tidak bersikap dan



<http://img.okeinfo.net>

CERITA SUKSES

CERITA SUKSES



<http://mediacenter.malangkota.go.id/2011/05/pertuni-wadul-dewan/>

<http://mediacenter.malangkota.go.id/2011/05/pertuni-wadul-dewan/>

Ketua PERTUNI Malang Supriyadi saat menyerahkan surat pengaduan kepada Christea Frisdiantara Ketua Komisi D DPRD Kota Malang.

bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Langkah teguran itu dilakukan karena ia sadar bahwa memperoleh pelayanan yang berkualitas adalah hak semua warga.

Contoh keberhasilan lainnya adalah keberanian komunitas untuk melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Malang (Dinsos). Dengan percaya diri, mereka menuntut akuntabilitas penggunaan dana hibah dari Dinsos. MCW membantu sebatas memfasilitasinya. Pada Selasa 16 Juli 2013, Dinsos melakukan survey bagi calon penerima bantuan hibah untuk penyandang difabel. Ini terjadi setelah melalui

proses diskusi panjang dan berbelit-belit yang dilakukan oleh komunitas ini.

Selain itu, anggota komunitas juga mulai memahami tentang peraturan lain yang saat ini sedang mereka hadapi, seperti Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Undang-undang Pemilihan Gubernur. MCW memang tidak memberikan materi cetak, semisal Undang-undang. Namun pemahaman anggota komunitas tentang UU Pelayanan Publik timbul dari proses diskusi-diskusi yang mengalir dan dari proses tanya jawab. □



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SIAP II

(Strengthening Integrity and Accountability Program)

CERITA SUKSES

Komunikasi Masyarakat Pasir Sari Mendesak Walikota Atasi Banjir Rob

Banjir karena hujan lebat
dan banjir rob sering
melanda wilayah Kecamatan
Pekalongan Utara



<http://pendapatakumyopinion.blogspot.com/>

ROB, hingga kini, masih menjadi problema bagi masyarakat Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Rob besar yang menggulung kawasan tepi Pantai Utara Pekalongan beberapa bulan terakhir, itu telah menyebabkan akses jalan dipenuhi genangan air. Ribuan pemukiman warga terendam. Ini menjadi penghambat besar warga dalam kesehariannya. Warga pun gelisah, saat rob melanda. Para petani gelisah karena hampir 70 persen luas lahan pertanian tak bisa diolah. Selain itu, sekitar 110 pengusaha batik mengalami kerugian karena adanya penambahan biaya untuk proses produksi batik yang memakan waktu lebih lama. Bahkan Wakil Wali Kota Pekalongan, AAlf Arslan Djunaid menyebut rob yang terjadi pada Juni lalu sebagai banjir yang terbesar dari sejarah rob yang terjadi di Pekalongan sebelumnya. Tak heran bila Pemerintah Kota Pekalongan lantas menetapkan status darurat.

Sebelum ini terjadi, Komunitas Warga Pasir Sari, KOMPASS (Komunikasi Masyarakat Pasirsari), telah berulang kali membahas penyelesaian persoalan rob. Namun, solusi yang signifikan tak kunjung datang. Seiring pra pemilihan Gubernur Jawa Tengah, Ketua KOMPASS, Ircham, mulai terlibat sebagai panitia Pilkada di Kelurahan Pasir Sari. Dari sana, ia membangun jaringan dengan pihak kelurahan dan apartur di dalamnya.

Kebetulan Pasir Sari memiliki lurah baru. Keberadaan Ircham sebagai aktivis setempat diperhitungkan Martoyo, lurah Pasir Sari. Seringkali Ircham diajak berdiskusi seputar isu permasalahan di Kelurahan Pasir Sari. Beberapa kawan-kawannya di KOMPASS pun mulai diajak serta sehingga menjadi dekat dengan pihak kelurahan. Lantas, KOMPASS mulai dilibatkan dalam Kepanitiaan Pilkada Gubernur Jawa Tengah serta diundang dalam rapat-rapat mewakili organisasi kepemudaan.



Jl. Pedati Raya No. 20, Jakarta Timur 13350
Phone: +62-21-8191623,
Fax: +62-21-85905262, +62-21-8500670
E-mail: yappika@indosat.net.id
Website: www.yappika.or.id

CERITA SUKSES

Setiap kali diskusi dengan pihak kelurahan, isu-isu pelayanan publik kerap diselipkan. Salah satunya, rob sebagai problema warga. KOMPASS sempat mengajak Lurah Martoyo berkeliling ke lokasi rob dan mengunjungi warganya yang terkena rob. Harapannya satu, lurah mampu menyuarakan masalah rob ini di tingkat kota supaya segera ada perbaikan.

Pada Mei lalu, Lurah Martoyo pun bersedia hadir sebagai pembicara dalam diskusi bulanan KOMPASS. Topiknya terkait penanganan rob. Apa-apa yang sudah dilakukan pihak kelurahan terkait penanganan rob, dijelaskan Martoyo panjang lebar. Namun, toh faktanya rob masih kerasan berkunjug ke Pasir Sari. Karenanya, komunitas menghendaki agar warga dipertemukan dengan walikota. Ia pun menyanggupi akan menghadirkan Walikota Pekalongan, Basyir Achmad, ke Pasir Sari pada 5 Juni 2013. Seluruh peserta diskusi diundang untuk hadir dan berdialog langsung dengan orang nomor satu di Kota Pekalongan ini.

Informasi tentang kehadiran walikota pun cepat menyebar. Selain sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda karang taruna, organisasi pecinta alam juga

berkomitmen menghadirinya. Namun rencana kehadiran kelompok-kelompok kritis tersebut justru dilihat Lurah Martoyo sebagai upaya rencana demonstrasi warga terhadap walikota. Sehari sebelum acara, Ircham dipanggil Lurah Martoyo supaya tidak melibatkan sejumlah tokoh kritis. Namun Ircham pun ngotot, mendesak Martoyo untuk mengagendakan adanya pertemuan dengan perwakilan warga terkait rob.

Pada 16 Juni 2013, secara mendadak, Lurah Martoyo mengabari Ircham agar mengajak perwakilan warga berdialog bersama petinggi Kota. Keesokannya, tujuh perwakilan hadir dalam dialog dengan walikota di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dalam pertemuan itu, warga menghendaki dibangunnya pintu air. Permintaan tersebut dikabulkan dengan kucuran dana sebesar Rp 15 juta. Namun, setelah berkoordinasi dengan pihak DPU, ternyata dana tersebut tidaklah mencukupi untuk dibangunnya pintu air. Jalan keluarnya, dana tersebut disepakati untuk mengurus daerah yang rendah supaya tidak terlalu parah bila banjir rob kembali melanda. □





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SIAP II

(Strengthening Integrity and Accountability Program)

CERITA SUKSES

Air Kembali Mengalir Di Buaran

“Sebagai kelompok baru di Pekalongan Selatan, kami dianggap pahlawan Kesiangan”



<http://forestclimatecenter.org>

YAPPIKA, Pekalongan - Sudah lebih dari tiga bulan, air bersih di Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Jawa Tengah, tidak mengalir selancar biasanya. Di Kampung Buaran bagian barat, air mengalir bagaikan orang kencing, seicrit-seicrit. Di Kampung Buaran bagian timur, air malah mampet sama sekali. Padahal, air menjadi hajat hidup sehari-hari warga di Kota Batik ini. Tanpa pasokan air yang cukup, kampung yang tidak jauh dari pesisir Pantai Utara Jawa ini menjadi begitu kering dan gersang. Warga pun gelisah dibuatnya.

Sejak Agustus 2012, warga harus berbondong-bondong membawa ember dan wadah seadanya untuk menimba air di sumur warga bagian barat. Malah ada yang mencuci dan mandi di sana. Mereka, warga yang berduit lebih, rela merogoh koceknya untuk membeli air galonan.

Sejak air sumurnya berubah warna menjadi keruh, warga Kampung Buaran tidak lagi meminumnya. Wajar saja. Limbah-limbah dari produksi batik cukup mencemari sungai dan sumur-sumur warga. Bila dikonsumsi, bisa membahayakan kesehatan.

Keluhan-keluhan warga itu ditangkap sekelompok pemuda yang tergabung dalam Komunitas Buaran. “Kami menyebutnya Green Peanut’s atau kacang hijau, karena kami masih muda dan hijau,” kata Dani, Ketua komunitas ini.

Pada November 2012, komunitas baru dampingan Pattiro Pekalongan ini lantas memperkenalkan sebuah Posko Pengaduan Layanan Publik. Warga Buaran pun mengadu. Dan, benarlah. Air mampet menjadi masalah yang paling banyak diadukan warga.

Langkah mediasi dipilih untuk mencari solusi atas persoalan warga. Dalam sebuah forum, komunitas ini menyampaikan keluhan masyarakat kepada pihak TAMARA, penyedia jasa layanan air bersih untuk warga Kelurahan Buaran. Hal ini sempat menimbulkan kesalahpahaman. Malahan, Dani dan teman-teman kelompoknya dianggap hendak mencari sensasi dan menyerang TAMARA yang dikelola oleh beberapa personel pemuda karang taruna setempat.

“Sebagai kelompok baru di Pekalongan Selatan, kami dianggap pahlawan Kesiangan,” ucapnya.

Pihak TAMARA menganggap air mampet di Buaran adalah isu lokal yang tak layak dibesar-besarkan. Perusahaan air lokal yang sudah lebih dari dua tahun melayani kebutuhan air warga itu malah balik mengkritik. Posko Pengaduan Layanan Publik harusnya ditujukan untuk isu-isu pelayanan publik di level kota!

“Dibutuhkan energi yang besar untuk meluruskan kesalahpahaman ini,” kata Nurrochmah, pegiat Pattiro Pekalongan yang juga salah satu warga Buaran.



Jl. Pedati Raya No. 20, Jakarta Timur 13350
Phone: +62-21-8191623,
Fax: +62-21-85905262, +62-21-8500670
E-mail: yappika@indosat.net.id
Website: www.yappika.or.id

CERITA SUKSES

1

CERITA SUKSES

Keberadaan Program SIAP2 telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kelurahan Buaran



Komunitas Buaran menjelaskan bahwa pengaduan warga tidaklah mengada-ada. Sejumlah data ditunjukkan. Selain persoalan air mampet, persoalan kesehatan dan sampah juga menjadi keluhan warga Buaran. Dan persoalan air nggak ngalir sebagai keluhan warga yang tertinggi adalah fakta!

“Hal ini murni dilakukan demi kebaikan seluruh warga Buaran,” tuturnya.

Mendengar hal itu, pihak TAMARA lambat laun mulai bisa memahami. Pasca pertemuan tersebut, pengurus TAMARA menggelar rapat internal. Tak lama berselang, muncullah Surat Edaran untuk 120 warga pelanggannya. Melalui surat itu, pihak TAMARA menjelaskan hal-hal teknis mengapa air tidak mengalir di Buaran.

Pertama, debit air menurun karena banyaknya sumur bor baru kurang dari 500 meter di sekitar sumur TAMARA. “Pihak Puskesmas menggali sumur 50 meter dari sumur TAMARA. Pihak PDAM milik Pemerintah menggali sumur 100 meter dari sumur TAMARA. Keberadaan sumur-sumur ini sebenarnya memang legal,” terang Dani.

Kedua, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan debit air juga menurun. Ketiga, sudah dua tahun beroperasi, mesin pompa belum mengalami perbaikan.

Pasca terbitnya surat edaran itu, pihak TAMARA terus melakukan pembenahan. Dalam jangka waktu tidak lebih dari dua minggu, air kembali mengalir di Buaran. Warga pun bergembira karena tidak lagi kesulitan memperoleh air bersih. Pasca peristiwa ini, pihak TAMARA mengucapkan terima kasih karena teman-temannya di Komunitas Buaran telah mengingatkan mereka untuk melayani warga dengan lebih baik lagi.

Komunitas Buaran atau Green Peanut's adalah kelompok dampingan Pattiwo Pekalongan. Cikal bakal kelompok ini adalah pemuda karang taruna Kelurahan Buaran yang sempat vakum berkegiatan. Pada pertengahan 2012, Dani dan teman-temannya yang masih aktif kemudian berinisiatif membentuk Green Peanut's. Seiring dengan diresmikannya bulan pengaduan oleh Pattiwo Pekalongan dan Walikota, sebanyak 12 kelompok dampingan, termasuk kelompok Green Peanut's ini, membuka posko pengaduan di wilayahnya masing-masing. Sebanyak 314 pengaduan terkumpul hanya dalam waktu sebulan.

Bagi masyarakat Kelurahan Buaran, kemunculan posko pengaduan menjadi saluran menuju perubahan. Dan, keberanian Green Peanut's memediasi warga dengan pihak penyedia jasa layanan air mampu mendorong terwujudnya perubahan, sehingga warga memperoleh air bersih yang menjadi haknya.

Keberadaan Program SIAP2 telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. YAPPIKA bersama dengan Pattiwo Pekalongan mendorong program ini demi mempercepat pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Program yang didukung oleh USAID ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya akuntabilitas masyarakat melalui pemanfaatan ruang-partisipasi masyarakat dalam kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik. (NTK)

CERITA SUKSES

Menjadi Mata, Telinga dan Corong Masyarakat

“IKBP merasa bersyukur dengan keberadaan PIAR dan YAPPIKA.

IKBP siap menjadi mata, telinga dan corong bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi berani dan lebih terbuka,”



YAPPIKA, KUPANG – Perjalanan ke Kota Kupang pada Maret 2013 lalu, menunjukkan fakta terbangunnya kesadaran warga akan kondisi pelayanan publik di Kota Kupang. Hal itu nampak dari inisiatif warga mengorganisir diri membentuk kelompok-kelompok komunitas. Sedikitnya 12 kelompok telah berkomitmen mengawal pelaksanaan pelayanan publik yang adil dan berkualitas di Kota Kupang.

Selain mengorganisir diri, mereka rutin berkumpul dan membicarakan problem pelayanan publik di Kotanya. Didampingi PIAR NTT, mereka siap melakukan advokasi dan mengawasi pelayanan publik Kota Kupang.

“IKBP merasa bersyukur dengan keberadaan PIAR dan YAPPIKA. IKBP siap menjadi mata, telinga dan corong bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi berani dan lebih terbuka,” kata Ketua Ikatan Keluarga Besar Pluralis (IKBP), Christian Frans dalam Diskusi Antar Kelompok Komunitas di Sekretariat PIAR NTT, Jumat, 22 Maret 2013.

IKBP terbentuk karena kesadaran bahwa kondisi pelayanan publik di Kota Kupang masih jauh dari harapan warga. Kelompok ini merasa terpanggil untuk menjawab persoalan-persoalan warga di komunitasnya. IKBP pun membuka posko pengaduan. Semangat kian bertumbuh seiring dengan antusiasme pengaduan warga. Sejumlah kasus di bidang kesehatan dan pendidikan telah mereka advokasi. Meski hasilnya belum cukup signifikan, kata Frans, paling tidak masyarakat semakin berani bersuara.

“Sebelumnya, masyarakat enggan mengadu dan hanya berhenti pada keluhan-keluhan. Setelah ada posko pengaduan, warga mulai berani mengadu,” ucapnya.

Pengalaman yang sama juga dialami Martha Taga, Ketua Himpunan Kelompok Serabutan Oebobo (HKSO). Perkenalannya dengan PIAR NTT telah menumbuhkan keberanian warga melakukan advokasi kasus-kasus yang dijumpai di komunitasnya. Kasus distribusi ‘Beras untuk orang miskin’ (raskin); kasus ketidakjelasan prosedur pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan kasus pengurusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang bermasalah adalah contoh kasus yang telah mereka advokasi bersama PIAR NTT.

CERITA SUKSES

“Kini keberadaan kelompok sudah dianggap ada oleh pemerintah. Dalam hal ini, keluhan. Penguatan kapasitas ke depan harus lebih diperkuat,”



“Awalnya kami tidak punya kemampuan apa-apa dalam hal advokasi. Setelah kenal PIAR, kami sudah berani melakukan advokasi masalah-masalah. Kami bersyukur. Adanya PIAR telah membimbing HKSO sehingga menjadi tidak takut-takut lagi,” terangnya.

Kesadaran kelompok warga ini nyatanya tidak hanya melulu pada masalah pelayanan publik saja. Hal itu nampak dengan adanya advokasi kasus Tenaga Kerja Wanita ke Polda NTT; advokasi kasus retribusi pasar oleh Forum Pedagang Karya Ampera; hingga masalah sesederhana kebiasaan warga membuang sampah di sungai yang advokasinya dilakukan oleh HKSO.

Sukses-sukses kecil melakukan advokasi nyatanya menambah kepercayaan diri. Keberadaan mereka diakui dan membawa manfaat bagi warga sekitar. “Kini keberadaan kelompok sudah dianggap ada oleh pemerintah. Dalam hal ini, keluhan. Penguatan kapasitas ke depan harus lebih diperkuat,” ungkap Ian Habaora, Ketua Forum Pemerhati Aspirasi Rakyat Kupang (FPAR).

Menurutnya, penguatan kapasitas tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pelatihan, pertemuan-pertemuan lintas kelompok dan pengadaan literatur terkait pelayanan publik. Penguatan kapasitas, lanjutnya, mutlak diperlukan karena mereka menyadari keterbatasannya. Sementara, kepercayaan yang telah diberikan masyarakat menjadi taruhannya. “Jangan sampai ada anggapan bahwa pos pengaduan itu adalah bohong,” tandasnya.

Kedekatan dan kepercayaan media massa terhadap PIAR NTT, oleh kelompok-kelompok ini dimanfaatkan sebagai ruang partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu contohnya, redaksi *Victorynews*, media cetak lokal, memberikan ruang bagi warga berdiskusi membicarakan pelayanan publik. Selain itu, mereka menyediakan rubrik khusus pelayanan publik di Kota Kupang.

Keberanian warga bernegosiasi dan berhadapan dengan pemerintah atau penyelenggara pelayanan patut diacungi jempol. Kelompok-kelompok warga tersebut sangat potensial menjadi kelompok pemantau pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sehingga ruang-ruang partisipasi publik seperti ‘ruang ekspresi inisiatif walikota’ dan momentum ‘walikota berkantor di kelurahan’, dapat menjadi wadah menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan ke Pemerintah Kota Kupang. (NTK)



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SIAP II

(Strengthening Integrity and Accountability Program)

CERITA SUKSES

Para Perempuan Penerjang Banjir Lampung



<http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/tanggamus-pesawaran/53532>

Sore itu, Kamis 24 Januari 2013, hujan deras mengguyur Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Hanya dalam tiga jam, Kota Gajah ini pun hampir tenggelam oleh banjir. Media menyiarkan, lalu lintas Kota Lampung nyaris lumpuh. Banjir menggenangi jalan-jalan protokol Kota Lampung setinggi satu hingga dua meter. Selain merendam jalanan protokol, banjir juga melumpuhkan rumah sakit, kampus, pasar tradisional, kompleks perbankan, hingga kompleks taman makam pahlawan. Hujan yang mengguyur sejak pukul 17.30 – 20.30 WIB., itu juga membanjiri pemukiman warga di enam kelurahan. Akibatnya, sebanyak 265 rumah warga terendam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 20 titik lokasi banjir Lampung. Dan, sebanyak tiga korban jiwa melayang akibat banjir ini.

Dari 20 titik itu, Kelurahan Kuala Garuntang termasuk salah satunya. Lokasi ini adalah lokasi terkena dampak yang cukup serius. Dalam hal evakuasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung dan BPBD Kota Lampung dibantu oleh satu peleton Korps Marinir. Namun sebelum para petugas itu datang, ada sekelompok warga yang ternyata lebih dahulu sigap melakukan aksi tanggap darurat.

Adalah Serikat Perempuan Bandar Lampung (SPBL), kelompok warga yang mempunyai inisiatif itu. Hal pertama yang dilakukan SPBL di lokasi kejadian adalah mengevakuasi para orang tua, para perempuan dan anak-anak ke lokasi yang lebih aman. Karena keterbatasan sumber daya, SPBL menggandeng banyak orang dan komunitas untuk membantu meringankan penderitaan korban banjir. Gayung pun bersambut. Sejumlah kelompok maupun perorangan hadir secara langsung



Jl. Pedati Raya No. 20, Jakarta Timur 13350
Phone: +62-21-8191623,
Fax: +62-21-85905262, +62-21-8500670
E-mail: yappika@indosat.net.id
Website: www.yappika.or.id

CERITA SUKSES

1

CERITA SUKSES

memberikan suplai logistik, perlengkapan kebersihan dan obat-obatan. Setelah, banjir mereda, ibu-ibu ini bersama-sama warga membersihkan lingkungannya dari lumpur dan sisa-sisa genangan. Komunitas yang intens melakukan advokasi kesehatan masyarakat Lampung ini juga berhasil mendatangkan Palang Merah Indonesia untuk melakukan pelayanan medis gratis.

Upaya SPBL mewujudkan inisiatif gagasannya menjadi aksi tanggap darurat tidaklah tanpa hambatan. Pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat dinilai kurang tanggap terhadap upaya evakuasi dan pemenuhan kebutuhan para korban banjir. Hal itu tampak dari sikap resisten Camat Panjang atas laporan Lilis Rohana, Ketua SPBL. Mereka tidak patah arang. Malah sebaliknya, SPBL dengan tegas dan percaya diri, tetap menuntun pemerintah kecamatan untuk mau terjun ke lokasi guna membantu proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan para korban banjir. Daya juang sukarelawan SPBL berhasil menggugah Camat Panjang Herni Musfi untuk segera turun ke tengah-tengah warganya. Ia pun kemudian berupaya dalam pengadaan makanan bagi warganya yang menjadi korban banjir.

Serikat Perempuan Bandar Lampung (SPBL) merupakan kelompok masyarakat di Kota Bandar Lampung. Mereka adalah kelompok kritis yang memperoleh pendidikan dari Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Sebelumnya, SPBL mendampingi warga dua kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang. Namun pasca pemekaran wilayah di Kota Bandar Lampung, area kerja SPBL menyempit di Kecamatan Panjang. Isu program yang menjadi garapan SPBL adalah revitalisasi posyandu sebagai garda terdepan bagi kesehatan masyarakat miskin.

Pasca evakuasi, SPBL mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh dan kelompok masyarakat guna menanggulangi masalah banjir. Mereka bersepakat memperkuat diri secara terstruktur dan akan membuat dasar argumen yang kuat mengenai solusi masalah banjir di Kota Lampung. Solusi-solusi konkret akan disampaikan kepada aparat pemerintah, mulai dari lurah, camat, hingga walikota Bandar Lampung. □



<http://www.rudibudianto.com/bandar-lampung-juga-di-landa-banjir.html>





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SIAP II

(Strengthening Integrity and Accountability Program)

CERITA SUKSES

Diskusi Komunitas

Sebagai Sarana Peningkatan Kapasitas

Penekanan diskusi juga selalu berangkat dari studi kasus di tingkat kelompok.



KOPEL SINJAI terus berupaya meningkatkan kapasitas kelompok dampingannya. Selama periode April hingga Juni 2013, pertemuan rutin terus dilakukan. Dari 16 kelompok dampingan, sebanyak 11 kelompok telah rutin melakukan kegiatan diskusi bulanan. Beberapa lainnya, belum bisa rutin karena masih baru.

Berkat diskusi-diskusi tersebut, pengetahuan kelompok terhadap sejumlah regulasi mengalami peningkatan. Utamanya, pemahaman regulasi terkait pelayanan publik. Isu inilah yang menjadi fokus perhatian kelompok dampingan dalam melakukan advokasi di wilayah mereka masing-masing. Selain itu, penekanan diskusi juga selalu berangkat dari studi kasus di tingkat kelompok. Ini menjadi referensi dalam menilai seberapa besar pengaruh atau dampak sebuah kebijakan bagi masyarakat.

Pengetahuan kelompok dapat dipetakan dalam dua kriteria, yaitu: pengetahuan internal dan eksternal.

1. Pengetahuan internal yakni segala sesuatu yang diketahui berasal dari pengalaman kelompok dalam melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang berkembang di wilayah masing-masing. Hal inilah yang kemudian menjadi pembelajaran di tingkat kelompok dampingan. Ada beberapa yang termasuk dalam kategori tersebut, diantaranya terkait dengan strategi advokasi, pendekatan, dan pemecahan masalah/analisis kasus.



Jl. Pedati Raya No. 20, Jakarta Timur 13350
Phone: +62-21-8191623,
Fax: +62-21-85905262, +62-21-8500670
E-mail: yappika@indosat.net.id
Website: www.yappika.or.id

CERITA SUKSES

1

CERITA SUKSES



2. Pengetahuan eksternal yaitu segala sesuatu yang diketahui yang bersumber dari luar dan bersifat membangun yang memperkuat kelompok serta dijadikan sebagai referensi dalam melakukan aksi/penyikapan terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Beberapa hal yang termasuk dalam kategori tersebut, diantaranya Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa. Sumber pengetahuan tersebut diperoleh kelompok dari berbagai sumber baik dari media, dari Kopel sebagai lembaga mitra kelompok, maupun dengan cara mengakses langsung. Sumber pengetahuan itulah yang kemudian dikaji dalam setiap diskusi di tingkat kelompok dampingan.

Implementasi dari pengetahuan kelompok dampingan dilakukan dalam tiga bulan terakhir. Diantaranya, advokasi terhadap adanya indikasi permainan yang dilakukan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat (SKPD) terhadap pengusulan daftar nama-nama tenaga honorer Kategori Dua (K2) di Kabupaten Sinjai. Dimana dari daftar tersebut, ada banyak tenaga honorer yang tidak masuk dalam daftar usulan tersebut. Didampingi Forum Peduli Masyarakat Sipil Sinjai (FPMS), para pengadu melakukan advokasi dari tingkat lokal hingga mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) di ibu kota negara.

Setelah melakukan koordinasi langsung dengan BKN di Jakarta, para pengadu yang diwakili oleh Awaluddin Adil dari FPMS, akhirnya diberikan peluang untuk menyampaikan daftar usulan K2 yang tidak sempat tercantum dalam daftar usulan pertama.

Selain itu, pada tingkat praktis kelompok dampingan juga intens melakukan pengawalan terhadap isu permasalahan lainnya. Salah satunya adalah Kelompok Pemuda Koro (KPK), yang mengawal kasus asusila yang dilakukan oleh salah seorang oknum pengajar (PNS) di Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Kasus tersebut berawal dari temuan rekaman video mesum si oknum. Kasus ini cukup meresahkan warga, sehingga kepala desa setempat melakukan tindakan peringatan kepada oknum tersebut. Karena melawan, kepala desa sempat melakukan tindakan yang berlebihan. Tamparan keras kepala desa mendarat di pipi oknum pengajar tersebut. Plak. Atas peristiwa tersebut, kepala desa diproses secara hukum oleh kepolisian. Berbeda dengan kepala desa, perbuatan mesum si oknum justru tak diproses.

KPK melakukan pengawalan atas kasus tersebut terkait dengan identitas oknum tersebut sebagai tenaga pendidik. Anehnya, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tidak melakukan tindakan terhadap oknum tersebut. Padahal si oknum adalah guru berstatus PNS. □

CERITA SUKSES

Keberadaan Forum Peduli Masyarakat Sipil (FPMS)

“Meski hasilnya belum maksimal, namun persoalan air bersih di Kampung Lappa ini sempat menarik media lokal, Sinjai TV, meliput langsung dari lapangan,”



YAPPIKA, SINJAI – Berkunjung ke Sinjai, Sulawesi Selatan, pertengahan Maret 2013 lalu, penulis menemukan sejumlah forum warga yang tengah bergiat menjawab persoalan-persoalan terkait pelayanan publik. Masyarakat Sinjai yang berkomunitas itu terdiri dari berbagai latar belakang sosial budaya, diantaranya komunitas nelayan, komunitas perempuan, komunitas pemuda dan pelajar serta komunitas pengrajin.

Karena minimnya pengetahuan dan informasi, warga seringkali mendapatkan perlakuan yang cenderung diskriminatif dalam memperoleh pelayanan. Selain itu, keterbatasan ruang-ruang partisipasi juga menjadi kendala warga dalam menyuarkan aspirasi.

Beruntung, ada sosok-sosok perempuan dan pelajar yang mampu menjadi ujung tombak dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Mereka yang lebih melek pengetahuan dan informasi, mengajak warga untuk kritis atas apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Bersama Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai, mereka mendorong warga berjuang memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, adil dan merata.

Adalah Musfirah, pemudi dari Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, ini mampu mengorganisir sejumlah ibu dan remaja untuk berkumpul dan peduli akan kondisi di wilayahnya. Komunitas Lappa yang berupa perkampungan nelayan sederhana, jauh dari sarana air bersih, kesehatan dan hidup layak. Sebaliknya, warga di mana komunitas ini tinggal, sangat dekat dengan kebiasaan minum minuman beralkohol. Bagi sebagian nelayan, mungkin wajar. Menjadi tidak wajar ketika berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Karena itulah, komunitas ini dibentuk.

Namanya Forum Peduli Perempuan Lappa (Forlipera). Walau pun hanya



CERITA SUKSES



beranggotakan 20 orang, bila mereka berkumpul, suasananya menjadi begitu ramai. Ibu-ibu ini kebanyakan berprofesi sebagai pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tak jarang pertemuan dilakukan di ruangan kecil milik PAUD Cahaya Kalbu. Pagi hingga siang hari, PAUD ini berfungsi sebagai sarana pendidikan. Selebihnya berfungsi menjadi Posko Pengaduan. Remaja-remaja SMP juga turut berkumpul dalam pertemuan-pertemuan forum yang belum genap satu tahun ini. Salah satu keberhasilan forum ini adalah melakukan advokasi kasus minimnya air bersih. “Meski hasilnya belum maksimal, namun persoalan air bersih di Kampung Lappa ini sempat menarik media lokal, Sinjai TV, meliput langsung dari lapangan,” ucap Musfira bangga.

Ada pula Wardaniah di Kelurahan Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan. Gadis yang masih berstatus mahasiswi ini mampu memfasilitasi lahirnya Forum Pemerhati Perempuan dan Anak (FPPA). Sejumlah ibu ia ajak berkumpul dan menampung keluhan warga. Berbagai pengaduan terkumpul. Pernah ada pengaduan warga terkait pelayanan dokter di Puskesmas Sinjai Selatan. Misalnya, masih adanya sikap pemberi layanan kesehatan yang diskriminatif, serta jadwal layanan kesehatan yang tidak konsisten. “Ada warga yang minta rujukan, dokter malah sibuk main catur,” ucap Wardaniah.

Persoalan lain juga disampaikan Darmawati, Ketua FPPA. Contohnya, pembagian ‘Beras untuk warga miskin’ (raskin) yang tidak adil serta pungutan dari pihak kelurahan atas distribusi KTP elektronik. Hebatnya, kaum perempuan ini justru berani mendatangi RT, RW dan Lurah untuk meminta klarifikasi. “Akhirnya mereka mengakui salah dan akan mengembalikannya ke warga,” kata Darmini disambut tepuk tangan anggotanya.

Keberadaan posko pengaduan, ternyata mampu mendorong masyarakat berani bergerak untuk memperoleh pelayanan

yang layak. Namun, tidak jarang forum menemukan sejumlah pengaduan yang sulit untuk diatasi.

Keberadaan Forum Peduli Masyarakat Sipil (FPMS) menjadi jawabannya. Forum advokasi tingkat kabupaten ini secara proaktif mengawal berbagai pengaduan yang berkembang di masing-masing kelompok warga. Forum yang dibentuk pada September 2012 ini memiliki tiga divisi; advokasi dan mobilisasi; publikasi; pemberdayaan perempuan. Keanggotaan FPMS terdiri dari beberapa perwakilan kelompok dampingan itu sendiri, sehingga lebih bisa memahami persoalan baik ketika berdiskusi atau pun saat menyampaikannya ke pihak penyelenggara layanan.

Satu contoh keberhasilan FPMS adalah langkah advokasi tindakan guru bersama kepala sekolah yang mengkoordinir penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), buku dan baju olahraga. FPMS melakukan unjuk rasa, mengangkat persoalan itu melalui media, melaporkannya ke SKPD terkait, serta meminta DPRD dan Dinas Pendidikan memanggil pelaku untuk mempertanggungjawabkannya. Hasil dari advokasi ini, adalah diberikannya sanksi teguran atas pelanggaran Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan di Kabupaten Sinjai. Akhirnya pihak sekolah yang bersangkutan mengembalikan biaya pembelian LKS yang dibayarkan siswa.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 628 Tahun 2012 Tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Perda Pelayanan Publik masuk pada Program Legislasi Daerah Tahun 2013. Hal ini membuka peluang lebar bagi FPMS dan masyarakat Sinjai melakukan pemantauan dan advokasi di lapangan. Semoga dengan ini, FPMS dan forum warga dapat menorehkan kisah-kisah sukses lainnya. (NTK)

CERITA SUKSES

Forum Komunikasi Kader Posyandu Surakarta Kreatif dan Berjejaring

FKKP dan PNPM
samakan persepsi terkait
anggaran untuk Posyandu
di Kota Surakarta



Di berbagai daerah, sering kita dengar cerita klem kondisi para Kader Posyandu. Mulai dari soal upah layak hingga minimnya anggaran untuk operasional Posyandu itu sendiri. Persoalan ini juga pernah dialami oleh para Kader Posyandu di Surakarta, Jawa Tengah. Memang diperlukan daya kreatifitas untuk menemukan solusinya. Nyatanya, bagaimana cara mendapatkan alokasi anggaran daerah untuk Posyandu, belum semua Kader Posyandu tahu. Para Kader ini berkumpul membentuk sebuah komunitas yang diberi nama Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP) Surakarta. Pertemuan demi pertemuan yang diisi dengan diskusi pun rutin dilakukan. Berkat forum-forum pertemuan rutin bulanan itu, antar Kader Posyandu di Kota Surakarta dapat saling belajar bagaimana menghidupkan Posyandu masing-masing. Utamanya, dalam memperoleh alokasi anggaran daerah.

Caranya, sesama Kader Posyandu saling bertukar nomor kontak dan saling membantu ketika ada Posyandu atau Kadernya mendapatkan kesulitan dalam menggeliatkan aktifitas Posyandu. Demikian pula dalam hal mengakses pelayanan kesehatan. Satu sama lain saling mengenalkan relasi yang bisa mendukung kinerja mereka dalam memperjuangkan anggaran untuk Posyandu. Ini dilakukan karena dana alokasi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta tidaklah mencukupi. Kini, banyak Kader Posyandu yang kian aktif dalam forum Musrenbangkel untuk mengusulkan berbagai program yang mana tujuan sebenarnya untuk kelangsungan kegiatan Posyandu. Hal di atas menunjukkan bahwa problem anggaran Kader Posyandu terjawab dengan cara kreatif menemukan solusi dan berjejaring melaksanakan solusinya itu. Salut!



CERITA SUKSES

Forum Komunikasi Kader Posyandu Surakarta Kreatif dan Berjejaring

FKKP dan PNPM
samakan persepsi terkait
anggaran untuk Posyandu
di Kota Surakarta



Keberadaan Becak tidak selalu diharapkan. Pada masanya, di kota-kota besar, Becak diusir karena menimbulkan kemacetan. Di daerah pun, respon aparat beragam. Keberadaan Becak masih menimbulkan pro dan kontra. Namun bagaimana pun, para Tukang Becak adalah penyedia jasa angkutan transportasi juga. Hak mereka untuk bekerja dan mencari nafkah perlu dijamin oleh negara. Di Surakarta, Jawa Tengah, para Tukang Becak berhimpun dalam FKKB (Forum Komunikasi Keluarga Becak) Surakarta. Melalui pertemuan rutin bulanan, mereka menjadi paham dan solid bergerak bersama memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Mereka juga akrab dengan media. Karenanya, setiap isu terkait hak para Tukang Becak muncul, mereka menjadi sumber berita.

Dengan demikian, suara para Tukang Becak ini bakal mudah didengar oleh aparat Pemerintah Kota Surakarta. Hasilnya, meloby dan audiensi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi hal yang biasa. Kelompok ini sudah dikenal baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sehingga FKKB sering diundang dalam berbagai kegiatan tingkat Kota.

Belakangan, FKKB berhasil meloby Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta untuk menerima aspirasi mereka dalam sebuah audiensi. Dalam audiensi yang dihadiri banyak wartawan itu, FKKB memperjuangkan adanya jalan untuk kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki dalam perencanaan *under pass* di Solo. Kepala Dinas terkait berjanji untuk mewujudkannya. Keberadaan dan kiprah FKKB dapat menjadi contoh komunitas lainnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkualitas, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah dan sering disingkir-singkirkan. Hebat!



